

Dinamika Efisiensi dan Efektivitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Perspektif pada Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Asmat

Ida Kobba ⁽¹⁾

Program Studi Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

idakobba07@gmail.com *

Kristian Hoegh Pride Lambe ⁽²⁾

Program Studi Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

Baharuddin ⁽³⁾

Program Studi Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

ABSTRACT

Efficiency and effectiveness in regional financial management are crucial factors in achieving good governance, especially in the era of regional autonomy. As a newly established region, Asmat Regency continues to face challenges in optimizing its budget management, as reflected in the significant budget surpluses reported in the 2019–2022 budget realization reports. These issues indicate suboptimal performance in both spending and revenue management, particularly regarding the efficiency of operational expenditures and the effectiveness in achieving strategic targets. This study aims to analyze the level of efficiency and effectiveness in financial management at the Department of Public Housing, Settlement Areas, and Land Affairs of Asmat Regency, which plays a key role in regional development. A descriptive analysis method is employed, using budget realization report data. The findings are expected to provide a comprehensive overview of the financial performance of the agency and offer recommendations for improving regional financial governance in the future.

Keywords: *efficiency; effectiveness; regional financial management; budget; Asmat Regency.*

ABSTRAK

Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah merupakan faktor krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya di era otonomi daerah. Kabupaten Asmat sebagai daerah hasil pemekaran masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi pengelolaan anggaran, yang ditunjukkan oleh sisa anggaran yang signifikan dalam laporan realisasi anggaran tahun 2019–2022. Permasalahan ini mencerminkan belum optimalnya kinerja belanja dan pendapatan, terutama dalam aspek efisiensi belanja operasional dan efektivitas pencapaian target strategis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Asmat, sebagai salah satu instansi yang memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif terhadap data laporan realisasi anggaran. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja keuangan instansi terkait serta menjadi dasar untuk rekomendasi perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depan.

Kata kunci: efisiensi; efektivitas; pengelolaan keuangan daerah; anggaran; Kabupaten Asmat.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi elemen penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam era otonomi daerah. Pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi belanja dan pendapatan daerah, harus mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan *value for money* (1). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat (2).

Kabupaten Asmat, sebagai salah satu daerah hasil pemekaran, menghadapi tantangan besar dalam mengelola sumber dayanya secara efektif. Dalam laporan realisasi anggaran tahun 2019–2022, masih ditemukan sisa anggaran yang signifikan setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan, baik dari sisi belanja maupun pendapatan, belum optimal. Ketidakefisienan dalam alokasi belanja operasional dan ketidakefektifan dalam mencapai target-target strategis menjadi isu utama yang memerlukan perhatian serius.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu instrumen utama untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi (3). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pengelolaan anggaran daerah harus dilakukan berdasarkan asas efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas (4). Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Asmat, masih menghadapi berbagai kendala dalam merealisasikan prinsip-prinsip tersebut.

Berdasarkan data laporan realisasi anggaran Kabupaten Asmat tahun 2019–2022, terdapat tren penurunan efektivitas dalam penyerapan anggaran, yang ditunjukkan oleh tingginya sisa anggaran pada akhir tahun anggaran. Selain itu, efisiensi dalam pengelolaan belanja daerah juga menjadi tantangan tersendiri, khususnya dalam belanja operasional dan modal. Hal ini tidak hanya mencerminkan ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya, tetapi juga menunjukkan potensi kehilangan peluang dalam mendukung program-program pembangunan strategis.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Asmat, yang memiliki tugas pokok dan fungsi penting dalam meningkatkan kualitas permukiman dan perumahan masyarakat, menjadi salah satu instansi yang perlu mendapatkan perhatian dalam evaluasi kinerja pengelolaan keuangannya (5). Dalam konteks ini, analisis tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa anggaran yang tersedia dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat (6,7).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Asmat. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif terhadap laporan realisasi anggaran, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian kinerja keuangan daerah serta memberikan rekomendasi perbaikan dalam tata kelola anggaran di masa depan.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Asmat berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2019–2022.
2. Menganalisis tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Asmat berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2019–2022.

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka penulis menyusun pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Asmat?
2. Bagaimana tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Asmat?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Asmat. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena pengelolaan keuangan secara mendalam berdasarkan perspektif informan kunci dan data dokumen terkait (8). Penelitian ini dirancang untuk mengeksplorasi bagaimana pengelolaan keuangan daerah diukur dan diterapkan berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas, serta faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian kinerja tersebut. Fokus utama adalah pada identifikasi praktik, tantangan, dan peluang yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

Sumber Data (9) yang digunakan terdiri dari:

1. Data Primer: Wawancara mendalam dengan informan kunci, yang terdiri dari pejabat pengelola keuangan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Asmat, staf teknis, dan pihak-pihak terkait.
2. Data Sekunder: Dokumen resmi seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2019–2022 dan peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur untuk menggali informasi terkait proses pengelolaan keuangan, efisiensi, dan efektivitas anggaran. Selain itu penulis melakukan analisis dokumen keuangan daerah untuk memahami konteks pengelolaan dan mengevaluasi capaian kinerja berdasarkan data aktual (10).

Data dianalisis dengan pendekatan analisis tematik (11), yang meliputi langkah-langkah:

1. Reduksi Data: Memilih data yang relevan dari hasil wawancara dan dokumen.
2. Kategorisasi: Mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama, seperti efisiensi, efektivitas, dan tantangan pengelolaan keuangan.
3. Penarikan Kesimpulan: Menyimpulkan temuan utama dengan menghubungkan data empiris dengan teori dan literatur yang relevan.

Validitas data dijaga melalui triangulasi metode (wawancara dan dokumentasi), triangulasi sumber data (berbagai informan), serta diskusi dengan ahli untuk memastikan keabsahan temuan.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari Kepala Dinas, sekretaris dinas, kepala sub bagian keuangan, kepala bidang perumahan rakyat, kepala bidang kawasan permukiman, kepala bidang pertanahan, staf pelaksana keuangan, auditor internal pemerintah daerah, anggota DPRD komisi yang membidangi keuangan dan infrastruktur serta perwakilan masyarakat atau LSM yang mengawasi tata kelola pemerintahan.

HASIL

Untuk melihat dan menjawab apa yang menjadi pertanyaan pada penelitian ini, kami menyajikan beberapa data yang relevan untuk mendukung hasil dari penelitian ini.

Tabel 1. Rekapitulasi Penerimaan Tahun Anggaran 2019

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH
1	PENDAPATAN	-	-	-
1.1	PENDAPATAN ASLI	30.000.000.00	134.895.084.56	104.895.084.56

1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-
1.1.2	Pendapatan Retribusi	-	-	-
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	30.000.000.00	134.895.084.56	104.895.084.56
1.1.5	Dana Perimbangan	-	-	-

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2024

Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan TA 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 Rp	REALISASI 2020 Rp	KENAIKAN / PENURUNAN	%	REALISASI 2019 Rp
1	Lain – Lain PAD Yang Sah	70.000.000.00	60.082.009.00	(74.813.075.56)	85.83	134.895.084.56
	Jumlah	70.000.000.00	60.082.009.00	(74.813.075.56)	85.83	134.895.084.56

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2024

Tabel 2 di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan TA 2020 sebesar Rp70.000.000.00 terealisasi sebesar Rp60.082.009.00 atau 85.83%. dibandingkan realisasi TA 2019 Rp.134.895.084.56 yang berarti mengalami Penurunan sebesar Rp(74.813.075.56).

Tabel 3. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan TA 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021 Rp	REALISASI 2021 Rp	KENAIKAN / PENURUNAN	%	REALISASI 2020 Rp
1	Lain – Lain PAD Yang Sah	70.000.000.00	0.00	(60.082.009.00)	0.00	60.082.009.00
	Jumlah	70.000.000.00	0.00	(60.082.009.00)	0.00	60.082.009.00

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2024

Tabel 3 di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan TA 2021 sebesar Rp70.000.000.00 terealisasi sebesar Rp0.00 atau 0.00%. dibandingkan realisasi TA 2020 Rp.60.082.009.00 yang berarti mengalami Penurunan sebesar Rp(60.082.009.00).

Tabel 4. Anggaran Belanja operasi daerah TA 2020

NO	BELANJA	ANGGARAN 2020 Rp	REALISASI 2020 Rp	%	KENAIKAN / PENURUNAN	REALISASI 2019 Rp
1	Belanja Operasi	25.446.103.727.15	24.104.685.653.00	94.73	(7.222.694.597.00)	31.327.380.250.00
2	Belanja Modal	0.00	0.00	0.00	(74.500.000.00)	74.500.000.00
3	Belanja Tak Terduga					-
	Jumlah	25.446.103.727.15	24.104.685.653.00	94.73	(7.297.194.597.00)	31.401.880.250.00

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2024

Tabel 4 di atas menunjukkan anggaran belanja operasi daerah TA 2020 sebesar Rp25.446.103.727.15 terealisasi sebesar Rp24.104.685.653.00 atau 94.73%, dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp31.401.880.250.00 yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp(7.297.194.597.00) lebih lanjut dirinci sebagai berikut.

Tabel 5. Anggaran-Realisasi Belanja operasi daerah TA 2020

NO	BELANJA OPERASI	ANGGARAN 2020 Rp	REALISASI 2020 Rp	%	KENAIKAN / PENURUNAN	REALISASI 2019 Rp
1	Belanja Pegawai	4.308.283.069.00	3.884.503.374.00	90.16	28.635.953,00	3.855.867.421,00
2	Belanja Barang	21.137.820.658.15	20.220.182.279.00	95.66	(7.251.330.550,00)	27.471.512.829,00
3	Bunga	-	-	-	-	-
4	Subsidi	-	-	-	-	-
5	Hibah	-	-	-	-	-
6	Bantuan Sosial	-	-	-	-	-
	Jumlah	25.446.103.727.15	24.104.685.653.00	94.73	(7.222.694.597.00)	31.327.380.250,00

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2024

Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja operasi TA 2020 sebesar Rp25.446.103.727.15 terealisasi sebesar Rp24.104.685.653.00 Atau 94.73%, yang berarti mengalami Penurunan sebesar Rp(7.222.694.597.00) dibandingkan dengan realisasi TA 2019.

Tabel 6. Anggaran-Realisasi Belanja operasi daerah TA 2021

NO	BELANJA	ANGGARAN 2021 Rp	REALISASI 2021 Rp	%	KENAIKAN / PENURUNAN	REALISASI 2020 Rp
1	Belanja Operasi	15.234.980.721.00	13.985.724.098.00	91.80	(10.118.961.555.00)	24.104.685.653.00
2	Belanja Modal	6.028.209.460.00	4.957.396.000.00	82.24	4.957.396.000.00	0.00
3	Belanja Tak Terduga					
	Jumlah	21.263.190.181.00	18.943.120.098.00	89.09	(5.161.565.555.00)	24.104.685.653.00

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2024

Tabel 6 di atas menunjukkan anggaran realisasi belanja daerah TA 2021 sebesar Rp21.263.190.181.00 terealisasi sebesar Rp18.943.120.098.00 atau 89.09%, dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp24.104.685.653.00 yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp(5.161.565.555.00). Lebih lanjut dirinci sebagai berikut:

Tabel 7. Rincian Anggaran-Realisasi Belanja operasi daerah TA 2021

NO	BELANJA OPERASI	ANGGARAN 2021 Rp	REALISASI 2021 Rp	%	KENAIKAN / PENURUNAN	REALISASI 2020 Rp
1	Belanja Pegawai	3.901.300.557.00	3.377.537.074.00	86.57	(506.966.300.00)	3.884.503.374.00
2	Belanja Barang	2.362.860.370.00	1.696.855.024.00	71.81	(18.523.327.255.00)	20.220.182.279.00
3	Bunga	-	-	-	-	-
4	Subsidi	-	-	-	-	-
5	Hibah	1.220.600.000.00	1.220.600.000.00	100.00	1.220.600.000.00	-
6	Bantuan Sosial	7.750.219.794.00	7.690.732.000.00	99.23	7.690.732.000.00	-
	Jumlah	15.234.980.721.00	13.985.724.098.00	91.80	(10.118.961.555.00)	24.104.685.653.00

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2024

Tabel 8. Rincian Anggaran-Realisasi Belanja Pegawai TA 2021

N O	BELANJA PEGAWAI	ANGGARAN 2021 Rp	REALISASI 2021 Rp	%	KENAIKAN / PENURUNAN	REALISASI 2020 Rp
1	Gaji & Tunjangan	2.067.050.557.00	1.968.242.583.00	95.22	117.401.047.00	1.868.219.374.00
2	Tambahan Penghasilan	1.834.250.000.00	1.409.294.491.00	76.83	24.074.491.00	1.385.220.000.00
3	Honorarium PNS	-	-	-	(55.080.000.00)	55.080.000.00
4	Honorarium Non PNS	-	-	-	(575.984.000.00)	575.984.000.00
	Jumlah Belanja Pegawai	3.901.300.557.00	3.377.537.074.00	86.57	(506.966.300.00)	3.884.503.374.00

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2024

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Pegawai TA 2021 sebesar Rp3.901.300.557.00 terealisasi sebesar Rp3.377.537.074 atau 86.57%, yang berarti mengalami Penurunan sebesar Rp506.966.300.00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp3.884.503.374.00,-.

Tabel 9. Anggaran-Realisasi Belanja operasi daerah TA 2022

NO	BELANJA	ANGGARAN 2022 Rp	REALISASI 2022 Rp	%	KENAIKAN / PENURUNAN	REALISASI 2021 Rp
1	Belanja Operasi	16.111.868.915.00	15.081.728.453.00	93.60	1.095.725.780.00	13.985.724.098.00
2	Belanja Modal	8.435.232.265.00	7.905.318.500.00	93.72	2.947.922.500.00	4.957.396.000.00
3	Belanja Tak Terduga					
	Jumlah	24.547.101.180.00	22.987.046.953.00	93.64	(4.043.648.280.00)	18.943.120.098.00

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2024

Tabel di atas menunjukkan anggaran realisasi belanja daerah TA 2022 sebesar Rp24.547.101.180.00 terealisasi sebesar Rp22.987.046.953.00 atau 93.64%, dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp18.943.120.098.00 yang berarti mengalami Kenaikan sebesar Rp4.043.648.280.00. Lebih lanjut dirinci pada tabel 10 berikut ini.

Tabel 10. Rincian Anggaran-Realisasi Belanja operasi daerah TA 2022

NO	BELANJA OPERASI	ANGGARAN 2022 Rp	REALISASI 2022 Rp	%	KENAIKAN / PENURUNAN	REALISASI 2021 Rp
1	Belanja Pegawai	4.235.870.406.00	3.441.284.999.00	81.24	63.747.925.00	3.377.537.074.00
2	Belanja Barang	1.846.925.600.00	1.665.183.454.00	90.16	(31.671.570.00)	1.696.855.024.00
3	Bunga	-	-	-	-	-
4	Subsidi	-	-	-	-	-
5	Hibah	10.029.072.909.00	9.975.260.000.00	99.46	8.754.660.000.00	1.220.600.000.00
6	Bantuan Sosial	-	-	0.00	(7.690.732.000.00)	7.690.732.000.00
	Jumlah	16.111.868.915.00	15.081.728.453.00	93.61	1.096.044.355.00	13.985.724.098.00

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2024

Tabel 10 di atas menunjukkan anggaran belanja operasi TA 2022 sebesar Rp16.111.868.915.00 terealisasi sebesar Rp15.081.728.453.00 Atau 93.61%, yang berarti mengalami Kenaikan sebesar Rp1.096.044.355.00 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp13.985.724.098.00.

Tabel 11. Rincian Anggaran-Realisasi Belanja Pegawai TA 2022

N O	BELANJA PEGAWAI	ANGGARAN 2022 Rp	REALISASI 2022 Rp	%	KENAIKAN / PENURUNAN	REALISASI 2021 Rp
1	Gaji & Tunjangan	2.402.402.406.00	2.019.804.999.00	84.07	51.562.416.00	1.968.242.583.00
2	Tambahan Penghasilan	1.833.450.000.00	1.421.480.000.00	77.53	12.185.509.00	1.409.294.491.00
	Jumlah Belanja Pegawai	4.235.870.406.00	3.441.284.999.00	81.24	63.747.925.00	3.377.537.074.00

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2024

Tabel 11 di atas menunjukkan anggaran Belanja Pegawai TA 2022 sebesar Rp4.235.870.406.00 terealisasi sebesar Rp3.441.284.999.00 atau 81.24%, yang berarti mengalami Kenaikan sebesar Rp63.747.925.00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp3.377.537.074.00,-.

Efisiensi Pengelolaan Keuangan. Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Keuangan mengungkapkan bahwa proses pengelolaan anggaran operasional menghadapi tantangan utama berupa keterlambatan pengadaan dan ketidakselarasan antara perencanaan anggaran dengan kebutuhan aktual.

"Banyak pengadaan barang dan jasa terlambat karena proses lelang sering kali memakan waktu lebih lama dari yang direncanakan. Akibatnya, beberapa kegiatan tidak terlaksana secara maksimal," ujar Kepala Sub Bagian Keuangan.

Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menunjukkan bahwa rata-rata realisasi belanja operasional selama tahun 2020–2022 hanya mencapai 91%, dengan beberapa program penting tidak terserap sepenuhnya.

Efektivitas Pengelolaan Keuangan. Menurut **Kepala Bidang Perumahan Rakyat**, salah satu kendala utama dalam pencapaian efektivitas adalah kurangnya koordinasi antarbidang dan keterbatasan dalam distribusi sumber daya.

"Kami sulit mencapai target pembangunan rumah tipe 45 karena hambatan distribusi material, terutama ke wilayah terpencil," jelasnya.

Sebagai dampak, realisasi pembangunan rumah masyarakat pada tahun 2021 hanya mencapai 63% dari target, sebagaimana terlihat dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Tantangan dan Peluang. Kedua informan sepakat bahwa upaya digitalisasi dalam pelaporan keuangan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. **Kepala Sub Bagian Keuangan** menyebutkan bahwa sistem manual masih sering digunakan, yang berisiko pada kesalahan administrasi.

"Dengan sistem manual, verifikasi data sering terlambat, sehingga waktu untuk penyelesaian laporan menjadi lebih panjang," ungkapnya.

PEMBAHASAN

Efisiensi. Tingkat efisiensi yang rendah menunjukkan bahwa perencanaan anggaran belum sepenuhnya mempertimbangkan kendala teknis di lapangan. Sebagaimana diungkapkan oleh informan, keterlambatan dalam proses pengadaan menjadi hambatan utama. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Hidayati & Ali (12) serta penelitian dari Anugeraheni & Yuniarta (13), yang menyatakan bahwa efisiensi keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana untuk menyesuaikan antara anggaran dan pelaksanaannya.

Efektivitas. Rendahnya pencapaian target pembangunan rumah masyarakat menunjukkan bahwa efektivitas belum tercapai sepenuhnya. Faktor koordinasi dan distribusi yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perumahan Rakyat merupakan kendala signifikan, terutama dalam wilayah dengan akses geografis yang sulit. Temuan ini menguatkan pendapat Fransiska & Hukom (14) yang menekankan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh manajemen sumber daya dan koordinasi yang memadai.

Rekomendasi Perbaikan. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, pemerintah daerah disarankan:

- i. Mengimplementasikan sistem manajemen keuangan berbasis digital untuk mempercepat proses administrasi.
- ii. Mengadakan pelatihan teknis untuk meningkatkan kapasitas staf dalam pengelolaan keuangan.
- iii. Menyusun perencanaan anggaran yang lebih realistis dengan mempertimbangkan kendala di lapangan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Asmat masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek efisiensi maupun efektivitas. Efisiensi pengelolaan keuangan belum optimal, terutama disebabkan oleh hambatan teknis dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta kurangnya sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Keterlambatan dalam proses ini menyebabkan beberapa program tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, sehingga sumber daya yang ada belum dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan yang direncanakan.

Dari sisi efektivitas, pencapaian target program, khususnya dalam pembangunan perumahan masyarakat, belum sepenuhnya terealisasi. Faktor geografis, koordinasi antarbidang, serta distribusi sumber daya menjadi kendala signifikan yang menghambat pelaksanaan program. Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan kinerja keuangan, sistem manual dalam pengelolaan keuangan masih menjadi salah satu penyebab rendahnya akurasi dan transparansi dalam pelaporan.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya implementasi sistem pengelolaan keuangan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Pelatihan bagi staf teknis juga diperlukan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola anggaran secara profesional (15). Selain itu, diperlukan perencanaan yang lebih realistis dan berbasis data, dengan mempertimbangkan kendala teknis dan geografis, agar alokasi anggaran lebih tepat sasaran .

Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan di dinas ini menunjukkan perlunya perbaikan sistemik untuk mendukung pencapaian good governance dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Upaya yang lebih kolaboratif antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan penggunaan anggaran daerah yang efisien, efektif, dan berdaya guna (16).

DAFTAR PUSTAKA

1. Rahman AZ, Saputra FL. Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cilacap. *Humanika*. 2022;22(2):117–26.
2. Lazuardi A, Gunarianto G, Pawestri HP. Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) di Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan. *Maneksi*. 2024;13(3):582–95.
3. Yani A. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada; 2002. 406 p.
4. Bastian I. Sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat; 2006.
5. Soleh C. Pengelolaan keuangan dan aset daerah : sebuah pendekatan struktural menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Bandung: Fokus Media; 2010.
6. Retnosari MC, Suryawati C, Harto P. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran di RSUD Dr. Kariadi Semarang. *J Manaj Kesehat Indones*. 2022;10(3):231–40.
7. Mahmudi M. Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN; 2019.
8. Ferdinand A. Metode Penelitian Manajemen. Edisi ke I. Semarang: AGF Books; 2014.
9. Arikunto. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta; 2018.
10. Sugiyono. Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta; 2020. 1–234 p.
11. Emzir. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Cetakan II. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada; 2012. 1–316 p.
12. Hidayati Y, Ali H. Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. *J Mirai Manag*. 2023;8(1):250–7.
13. Anugeraheni NKD, Yuniarta GA. Analisis Kinerja Keuangan Desa dengan Menggunakan Rasio Keuangan Daerah pada Pemerintah Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019. *J Ilm Mhs Akunt*. 2022;13(2):426–37.
14. Novia Fransiska, Alexandra Hukom. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah, Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Kota Palangka Raya Tahun 2019-2022. *J Publ Sist Inf dan Manaj Bisnis*. 2023;2(2):75–83.
15. Halik JB, Sasabone L, Dezi A, Sipi S. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga di Desa Sesean , Kabupaten Toraja Utara. *Publ Has Pengabd Kpd Masy [Internet]*. 2024;3(2):51–6. Available from: <https://jurnal.mdp.ac.id/index.php/padimas/article/view/6554>
16. Halik JB, Yemima Y, Halik MY. THE INFLUENCE OF PARTICIPATION IN BUDGET PREPARATION ON MANAGERIAL PERFORMANCE AT PT PLN (PERSERO) DISTRIBUTION MAIN UNIT AND SULAWESI LOAD MANAGEMENT CENTER. *J Entrep Business, Manag [Internet]*. 2023;1(3):9–19. Available from: <https://journal.amkop.id/jebm/article/view/66>